

## **Analisis determinan tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2016-2022**

**Atsna Himmatul Aliyah<sup>1</sup>; Farida Rahmawati<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

*\*E-mail korespondensi: farida.rahmawati.fe@um.ac.id*

### **Abstract**

*Income inequality is a common issue in many countries, making it hard for communities to thrive. This study looks at what factors affect income inequality in the Special Region of Yogyakarta from 2016 to 2022. The data used include education, health, labor, and income per person. The study uses a number-crunching approach called panel data regression analysis with E-views 10. The findings reveal that education, health, labor, and per capita income all play a significant role in income inequality. Education has a positive impact on income inequality, while health and labor have a negative impact. Surprisingly, per capita income doesn't significantly affect income inequality. This means that in the Special Region of Yogyakarta, only education, health, and labor partially determine income inequality. Therefore, local leaders should invest in education and health to improve the quality of their workforce, aiming for more equal incomes in society.*

---

**Keywords:** *income inequality, education, health, labor, income per capita*

### **Abstrak**

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan umum di setiap negara. Tingginya ketimpangan pendapatan semakin mempersulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2022. Data yang digunakan berupa pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, serta pendapatan per kapita. Adapun metodenya adalah pendekatan kuantitatif dan teknik analisis regresi data panel melalui E-views 10. Temuannya memberikan hasil bahwa pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pendapatan per kapita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian, pendidikan memiliki pengaruh positif, sementara kesehatan dan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan. Artinya, di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja secara parsial menentukan tingginya ketimpangan pendapatan. Dengan begitu, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan agar menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga bisa membantu mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat.

---

**Kata kunci:** ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pendapatan per kapita

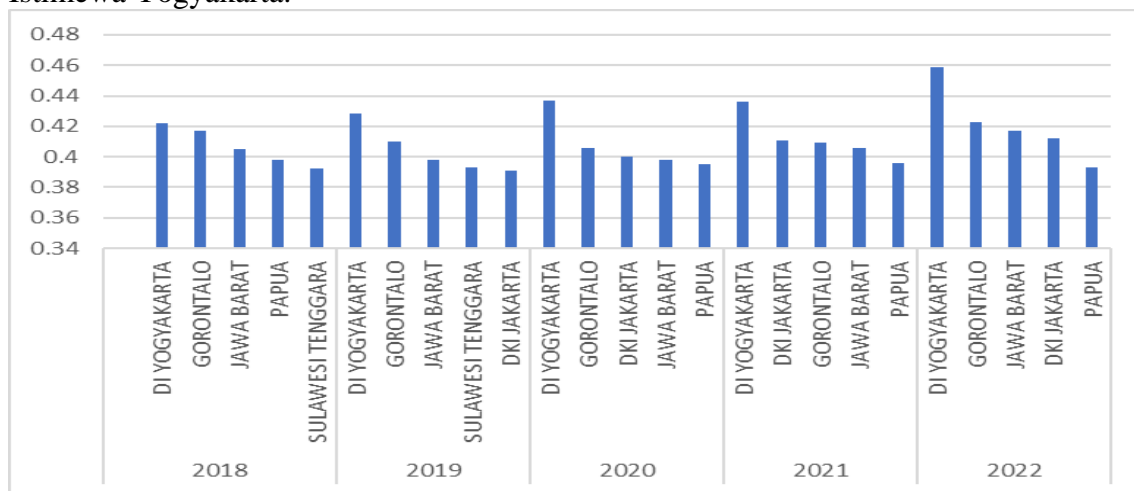
### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk melihat perkembangan suatu daerah maupun negara. Hal ini tidak terlepas dari tujuan

pembangunan itu sendiri, yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Beberapa negara berkembang, terdapat dua masalah besar yang terus dihadapi, yakni perihal kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan (Rachmawatie, 2021). Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Tingginya tingkat ketimpangan, maka distribusi pendapatan suatu daerah semakin tidak merata.

Keadaan semacam itu, semakin memperlebar jurang antar masyarakat dengan tingkat ekonomi kelompok kaya dan miskin. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Bahkan, tingginya pencapaian pertumbuhan ekonomi juga belum mampu untuk menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan, salah satunya berupa pendapatan (Widyastuti & Indrawati, 2021). Kemudian, menurut World Bank (2015), pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyentuh angka 20% dan hanya dinikmati oleh orang kaya. Di mana sisa dari persentase tersebut belum bisa menikmati dampak dari tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga menjadi salah satu faktor mengapa tingkat ketimpangan pendapatan terus terjadi.

Dalam menentukan nilai ketimpangan tersebut, BPS menggunakan alat analisis gini ratio dengan skor penentuannya bernilai kisaran angka 0 – 1. Di mana, semakin mendekati angka 0, maka tingkat distribusi pendapatan masyarakat akan semakin merata. Begitu pula sebaliknya, apabila mendekati angka 1, maka tingkat distribusi pendapatan masyarakat akan semakin mengalami ketimpangan atau tidak merata. Gini ratio menjadi analisis perhitungan yang baik dalam menjelaskan bagaimana hubungan penduduk antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Adanya ketimpangan ini, dapat dirasakan oleh semua daerah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



**Grafik 1.** Peringkat 5 teratas Gini Ratio Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, bisa dilihat selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2022 lalu, gini ratio di Provinsi D.I. Yogyakarta menjadi yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat distribusi pendapatan antar penduduk di Provinsi DIY belum merata dan dapat dikatakan jauh di bawah nasional maupun provinsi lainnya. Angkanya mengalami fluktuasi, pada 2017 gini ratio Provinsi DIY sebesar 0,44 dan turun pada 2018 menjadi 0.422. Kemudian, terakhir pada 2022 lalu menjadi paling tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir dengan nilai gini ratio sebesar 0,459. Semakin tinggi nilai gini ratio suatu wilayah, menandakan persebaran pendapatan semakin tidak merata, sehingga akan semakin mengalami ketimpangan. Hal

ini bisa terjadi karena diakibatkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Tingkat pendidikan menjadi komponen pertama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti yang diungkapkan oleh Nuraini (2017), bahwa tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan maupun menurunkan disparitas pendapatan suatu wilayah. Kemudian, Yang & Qiu (2016), juga menyatakan bahwa pendidikan memainkan peran penting untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan. Di mana, semakin tinggi dan baik lulus pendidikan seorang individu, maka besaran upah yang diterima pun juga semakin besar (Wahyuni & Karta, 2017).

Hasil penelitian dari Amaliyah & Arif (2023), mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, justru hasil dari Anshari et al. (2018), menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Di mana, setiap kenaikan dalam hal akses belajar atau pendidikan yang ditamatkan penduduk, tidak akan menurunkan ketimpangan pendapatan, begitu pula sebaliknya. Kemudian, penelitian lain mengungkapkan jika tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Nuraini, 2017). Artinya, tingginya pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk, maka dapat membantu mengurangi disparitas pendapatan.

Tidak hanya aspek pendidikan saja, melainkan kesehatan juga memiliki peran penting dalam menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini berarti dilihat dari aspek sumber daya manusia karena perbedaan kesehatan di masyarakat juga menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sabir & Aziz (2018), bahwa kesehatan menjadi salah satu sumber dasar produktivitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan begitu, peningkatan kesehatan dapat membantu menurunkan ketimpangan pendapatan karena tubuh yang sehat bisa untuk terus bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Selain itu, Sabir & Aziz (2018), juga menegaskan bahwa kesehatan yang dihitung melalui angka harapan hidup memiliki peranan yang penting dalam menentukan ketimpangan pendapatan. Jika pendapatan yang dihasilkan penduduk semakin tinggi, maka status kesehatannya pun menjadi lebih baik. Menurut Lead (2017), ketimpangan pendapatan menjadi salah satu penyebab lambatnya pencapaian hasil kesehatan. Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Ariutama & Syahrul (2017), mengungkapkan bahwa kesehatan mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang dilihat melalui indikator perhitungan angka harapan hidup.

Menurut Wulandari & Rahmawati (2022), tenaga kerja yang berkualitas dapat mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan penduduk. Di mana, produktivitas suatu daerah bisa berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga mereka yang memiliki produktivitas lebih tinggi, maka pendapatannya pun juga lebih tinggi (Khoirudin & Musta'in, 2020). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santoso & Mukhlis (2021), tenaga kerja dapat mempengaruhi pendapatan karena setiap penduduk bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dari pada yang diperoleh orang lain berdasarkan profesi yang dimiliki. Maka dari itu, partisipasi angkatan kerja sangat penting dalam mewujudkan kesempurnaan distribusi pendapatan.

Menurut Laut et al. (2020), tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan atau lowongan pekerjaan, maka bisa saja mempengaruhi tingginya ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, diperlukan tenaga kerja yang berkualitas karena berpengaruh terhadap distribusi pendapatan

(Wijayanti et al., 2023). Namun, dari hasil temuan dari Pinilih (2021), mengungkapkan bahwa angkatan kerja tidak bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya ketimpangan pendapatan tidak akan berdampak apabila partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan atau penurunan.

Selain itu, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga bisa diukur melalui parameter berupa Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Menurut Rahma (2018), perbedaan sumber daya, sarana dan prasarana, hingga investasi antar wilayah dapat menimbulkan keterbelakangan wilayah. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kesenjangan dalam hal pendapatan per kapita antar masyarakat di suatu provinsi (Darzal, 2016). Hasil penelitian dari Hartini (2017), menjelaskan jika PDRB per kapita mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Teori Kuznet yang mana terdapat hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Hamzah et al., 2017). Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan per kapita dapat membuka kesempatan penduduk untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi serta mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga disparitas pendapatan wilayah dapat berkurang.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, masih terdapat perbedaan serta ketidak konsistenan mengenai hasil yang relevan. Hal ini tentu dibutuhkan kembali penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa, karena berdasarkan data BPS wilayah ini memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan supaya bisa dijadikan referensi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta melalui empat variabel makro ekonomi, yakni Pendidikan dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah, Kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup, Tenaga Kerja melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan pendapatan per kapita dari PDRB per kapita. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta.

#### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Creswell, (2014) metode kuantitatif adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menguji teori-teori tertentu yang ada dalam penelitian. Cara yang dilakukan adalah dengan melihat hubungan antar variabel yang digunakan. Dalam hal ini, data penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Kemudian, variabel independen dalam penelitian ini berupa pendidikan yang indikator perhitungannya didapatkan dari rata-rata lama sekolah (RLS), kesehatan dilihat melalui angka harapan hidup (AHH), tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan pendapatan per kapita dari indikator PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Sementara itu, untuk variabel dependennya adalah ketimpangan pendapatan yang didapatkan dari gini ratio nilai koefisien 0 – 1 yang mana semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan semakin tinggi.

Selanjutnya, untuk metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data panel yang diolah menggunakan alat statistic berupa Eviews 10. Menggunakan data panel berarti gabungan dari cross section berupa 5 kabupaten/kota di D.I Yogyakarta dan time series tahun 2016- 2022. Alasan pemilihan tahun 2016-2022

dalam penelitian adalah karena selama 7 tahun tersebut, D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan nilai gini rasio atau ketimpangan pendapatan tertinggi dibandingkan daerah lainnya.

Kemudian, dalam proses analisis dilakukan beberapa tahapan, yakni pemilihan model terbaik melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah itu, baru masuk pada tahapan pengujian asumsi klasik dan terakhir uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent terhadap dependent. Adapun model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1X_{it} + \beta_2X_{it} + \beta_3X_{it} + \beta_4X_{it} + e_{it}.....(1)$$

Keterangan:

- Y = ketimpangan pendapatan
- X1 = pendidikan (rata-rata lama sekolah)
- X2 = kesehatan (angka harapan hidup)
- X3 = tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
- X4 = PDRB per kapita
- $\beta_0$  = intercept atau konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien variabel independen
- i = kabupaten/kota di DIY
- t = tahun (2016-2022)
- e = error term

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengujian model terbaik, penelitian ini menggunakan model estimasi Common Effect Model (CEM) dengan tingkat probabilitas sebesar  $0,126 > 0,05$ . Model ini didapatkan melalui uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Setelah itu, dilakukan uji asumsi klasik untuk menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak terdapat bias atau penyakit. Kemudian, baru dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap dependen dengan tingkat toleransi 5% atau 0,05. Berikut hasil analisis regresi data panel dalam penelitian ini:

**Tabel 1.** Hasil analisis regresi linier berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.84928	6.546446	2.115542	0.0428
Pendidikan	0.762555	0.099063	7.697636	0.0000
Kesehatan	-4.014190	1.644471	-2.441023	0.0208
Tenaga Kerja	-0.038258	0.032733	-1.168778	0.0317
Pendapatan Per Kapita	0.218872	0.277172	0.789659	0.4359
R-squared				0.787762
F-statistic				27.83774
Prob(F-statistic)				0.00000
Durbin-Watson stat				1.762542

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output pengujian di atas, maka didapatkan model estimasi regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \beta_4 X_{it} + E_{it} \dots \dots \dots (2)$$

$$Y_{it} = 13,84 + 0,762 X_{it} + (-4,014 X_{it}) + (-0,038 X_{it}) + 0,218 X_{it} + E_{it} \dots \dots \dots (3)$$

**Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan model estimasi Common Effect Model (CEM), variabel pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien 0,762. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan mempunyai hubungan yang positif serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh setiap penduduk belum mampu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, justru turut mengalami kenaikan. Hasil ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah & Arif (2023); Nadya (2019); dan Istikharoh et al. (2018), yang mengungkapkan jika pendidikan memiliki hubungan positif signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Dalam hal ini, seharusnya tingginya pendidikan yang ditempuh mampu untuk lebih meningkatkan produktivitas dan keterampilan supaya mendapatkan akses kesempatan kerja lebih luas, seperti halnya dalam Teori Human Capital.

Melalui Teori Human Capital, dijelaskan bahwa pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi produktivitas individu dan membantu meningkatkan pendapatan seseorang. Namun, tingginya pendidikan dan produktivitas individu ini ternyata belum mampu untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di DIY, sehingga teori tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di setiap kabupaten/kota masih mengalami kesenjangan yang dilihat dari nilai rata-rata lama sekolahnya (RLS). Di mana, Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai rata-rata lama sekolah paling rendah, yakni hanya di angka 7,31 tahun saja pada 2022 lalu dan jaraknya cukup jauh dengan Kota Yogyakarta yang mencapai 11,89 tahun serta Kabupaten Sleman berada di angka 10,94 tahun. Kondisi ini menjadi bukti bahwa belum terjadi pemerataan pembangunan di sektor pendidikan untuk wilayah Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul karena nilai rata-rata lama sekolah masih di bawah 10 tahun.

Selain itu, sebagian besar individu yang lulus dari SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta masih banyak yang belum bekerja atau menganggur. Di mana, mereka sebagai tenaga kerja lebih memilih untuk menunggu supaya pekerjaan yang sesuai dengan keinginan tanpa melihat akses kesempatan kerja yang lain, sehingga semakin menambah tingkat pengangguran dan sulit untuk mewujudkan pemerataan pendapatan. Kondisi ini pun selaras dengan hasil penelitian dari Muharam (2022), yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan karena masih belum banyak yang mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa dilihat bahwa data statistik menunjukkan jika tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SMA 4,54%, SMK 3,93%, dan lulusan Perguruan Tinggi sebesar 3,04% (Kusumo, 2023).

**Pengaruh kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan**

Hasil temuan dari analisis yang telah dilakukan, disebutkan nilai probabilitas variabel kesehatan sebesar  $0,0208 < 0,05$  dengan nilai koefisien -4.014. Nilai ini mempunyai arti jika kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Di mana, semakin baik kondisi kesehatan setiap penduduk, maka dapat membantu menurunkan angka ketimpangan pendapatan di daerah. Hasil ini sejalan dengan temuan oleh Ariutama & Syahrul (2017),

yang mengungkapkan jika angka harapan hidup sebagai indikator perhitungan kesehatan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, tingginya angka harapan hidup menunjukkan tingkat kesehatan di masyarakat semakin berkualitas, sehingga bisa meningkatkan produktivitas untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik dan mendapatkan penghasilan tetap.

Seperti halnya dalam teori fundamental cause yang menyatakan bahwa kesehatan dan pendapatan memiliki hubungan erat. Di mana, penduduk yang memiliki tingkat sosial ekonomi lebih baik akan terhindar dari penyakit yang membahayakan dan tidak merasa kesulitan untuk mewujudkan keadaan tubuh yang lebih sehat karena mempunyai pendapatan lebih. Sebaliknya, jika kesehatan buruk akan membuat individu sulit mencari pekerjaan, sehingga semakin memperbesar tingkat pengangguran. Kondisi ini selaras dengan penelitian dari Detollenaere et al. (2018), yang mana kesehatan mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Eropa. Hal ini menandakan bahwa tingginya angka harapan hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dampak positif untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas serta membantu mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Apalagi, data statistik menunjukkan bahwa nilai angka harapan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 menjadi paling tertinggi dibandingkan 34 provinsi lainnya, yakni sebesar 75,08 tahun. Hal ini bisa dikatakan jika rata-rata lama waktu hidup seseorang menjadi lebih tinggi, sehingga semakin baik derajat kesehatan setiap individu dan memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Kabupaten Kulonprogo sendiri menjadi daerah di DIY yang memiliki angka harapan hidup lebih dari 75 setiap tahun sejak 2016. Untuk daerah lainnya pun tidak mengalami kesenjangan yang cukup tinggi karena hanya Kabupaten Bantul yang angka harapan hidupnya berada di angka 73 tahun. Kondisi sebenarnya ini mendukung hasil penelitian karena semakin baik nilai AHH di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan untuk membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

### **Pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan**

Analisis yang sudah dilakukan, menunjukkan variabel tenaga kerja memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,031 < 0,05$  dan besaran koefisien regresi  $-0,038$ . Nilai ini mempunyai arti bahwa tenaga kerja mempunyai hubungan negatif serta signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I Yogyakarta. Di mana, semakin tinggi kualitas tenaga kerja dapat membantu untuk menurunkan tingkat kesenjangan persebaran pendapatan di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian Nilasari & Amelia (2022); Pradnyaswari et al. (2021); yang mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai indikator perhitungan tenaga kerja memang memiliki hubungan yang erat dengan ketimpangan pendapatan dan arahnya negatif. Hasil ini tidak lepas dari kondisi yang sebenarnya, di mana setiap tahun tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah akan mengalami kenaikan, sehingga jumlah angkatan kerja pun turut meningkat (Rosalitta & Muljaningsih, 2022).

Maka dari itu, harus diimbangi dengan kesempatan atau lowongan pekerjaan yang lebih luas supaya mampu untuk menampung tingginya angkatan kerja setiap tahunnya. Dengan begitu, dapat membantu mengurangi pengangguran dan mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan di setiap daerah. Akan tetapi, untuk mewujudkannya juga harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat melalui keterampilan serta keahlian yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Teori Skill-Biased Technological Change (SBTC) karena semakin baik kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dapat membantu untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi, sehingga mereka yang kurang dalam hal keahlian di suatu bidang akan sulit mendapatkan pekerjaan dan upahnya pun rendah. Hal inilah kenapa kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

sangat penting untuk menentukan pendapatan yang diterima setiap pekerja.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2022 lalu, nilai TPAK mencapai 72,60% atau 2,34 juta orang. Nilai ini meningkat 0,92% dibandingkan tahun 2021 lalu yang mengindikasikan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa dan terlibat dalam kegiatan ekonomi pun semakin tinggi. Dengan begitu, bisa memberikan kontribusi dan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah bersangkutan karena tenaga kerja yang aktif cukup banyak. Dalam hal ini, tentunya tingkat produktivitas tenaga kerja juga meningkat, sehingga memperbesar peluang untuk meningkatkan output ekonomi dan kesejahteraan secara keseluruhan serta pemerataan pendapatan di masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa memang tenaga kerja yang berkualitas bisa membantu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

### **Pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan**

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, pendapatan per kapita memiliki nilai probabilitas  $0,435 > 0,05$  dengan besaran koefisien regresi 0,218. Hasil ini berarti pendapatan per kapita mempunyai hubungan positif dan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Artinya, meskipun tingkat pendapatan di suatu wilayah meningkat, maka ketimpangan pendapatan masih tetap ada atau belum mengalami banyak perubahan. Hasil ini didukung dengan penelitian Astuti & Hukom (2023); Damanik et al. (2018); dan Nadya, (2019), yang mengungkapkan bahwa PDRB per kapita tidak mempunyai pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap kesenjangan persebaran pendapatan.

Hasil ini berarti menolak Teori Kuznet yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita mempunyai pengaruh terhadap tingginya tingkat ketimpangan pendapatan. Meski begitu, Teori Harrod Domar dan Neo Klasik menjelaskan bahwa peranan kapital sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini karena wilayah yang mempunyai potensi tinggi, maka pertumbuhan ekonominya pun semakin tinggi pula. Bahkan, Teori Neo Marxist juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru semakin memperlebar jurang ketimpangan kelompok kaya dan miskin (Arif & Wicaksana, 2017). Artinya, besaran nilai PDRB per kapita suatu daerah juga bergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor produksi yang dimiliki.

Tidak adanya hubungan atau pengaruh antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan bisa dilihat dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di Provinsi DIY. Di mana, PDRB per kapita sebagai indikator perhitungannya dari data statistik menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan di antara kabupaten/kota di wilayah bersangkutan. Hal ini dibuktikan bahwa nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di DIY dengan angka menyentuh 78,81 juta pada tahun 2022 lalu (BPS, 2024). Padahal, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul hanya menyentuh angka 20 juta saja pada tahun 2022 lalu (BPS, 2024). Kemudian, untuk Kabupaten Sleman sebesar 32,81 juta pada tahun 2022. Angka ini menjadi bukti bahwa rata-rata pendapatan per individu di masing-masing wilayah masih belum merata, sehingga cukup sulit untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di provinsi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian, untuk pendidikan memiliki hubungan positif signifikan terhadap



ketimpangan pendapatan. Artinya, tingkat pendidikan yang tinggi justru belum bisa membantu untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, melainkan ikut mengalami kenaikan. Kondisi ini dikarenakan masih banyak lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang masih belum bekerja, sehingga pemerintah daerah harus melakukan intervensi supaya para lulusan tersebut bisa segera mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan untuk membantu pemerataan pendapatan di masyarakat. Berbeda halnya dengan kesehatan karena berpengaruh negatif signifikan yang berarti tingginya angka harapan hidup sebagai indikator perhitungan kesehatan dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Selain itu, tenaga kerja juga mempunyai hubungan yang erat dan arahnya negatif. Artinya, tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat membantu menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, pendapatan per kapita memberikan kesimpulan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan arah yang positif. Hasil ini dikarenakan rata-rata pendapatan per individu di setiap kabupaten/kota di DIY masih belum merata, sehingga tidak cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun pendapatan per kapita naik, belum tentu bisa menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

### **Saran**

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan supaya menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga bisa membantu mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Selain itu, diharapkan pula pemerintah menciptakan program lapangan kerja lebih luas, baik bagi lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja, maka secara tidak langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan serta kesehatan setiap penduduk juga semakin meningkat. Pemerintah juga harus terus untuk memperhatikan pemerataan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan supaya pembangunan bisa dinikmati secara merata. Penelitian ini hanya melihat determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui aspek pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pendapatan per kapita saja. Penelitian selanjutnya, diharapkan bisa mencari faktor yang mempengaruhi ketimpangan dari segi gender di beberapa bidang tertentu. Hal ini dikarenakan, bisa saja ketidaksetaraan gender juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta maupun wilayah lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amaliyah, S., & Arif, M. (2023). Analisis determinan disparitas distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017–2021. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(2), 1–10. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i2.1811>
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). Analisis pengaruh pendidikan, upah minimum provinsi, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. *EcoGen*, 1(September), 494–502. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/4990>
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan pendapatan propinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–

328. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1342/763>
- Ariutama, I. G. A., & Syahrul, N. (2017). Analisis panel VAR: Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Info Artha*, 1, 1–16. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.74>
- Astuti, D., & Hukom, A. (2023). Analisis pengaruh PDRB, IPM dan tenaga kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan Tengah. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 73–84. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/optimal/article/view/1395/1224>
- Badriah, L. S., & Istiqomah. (2022). Does gender inequality lead to income inequality? Evidence from Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 17(1), 1–13. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium>
- BPS. (2024a). Produk domestik regional bruto Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha 2019–2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. <https://bantulkab.bps.go.id/publication/2024/04/04/898844b19023228042dc5f4e/p/roduk-domestik-regional-bruto-kabupaten-bantul-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html>
- BPS. (2024b). Produk domestik regional bruto Kota Yogyakarta menurut lapangan usaha 2019–2023. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. <https://jogjakota.bps.go.id/publication/2024/04/04/ca5bf1038fbba17e4b76ad64/pr/oduk-domestik-regional-bruto-kota-yogyakarta-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html>
- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/pdpd/article/view/4533/8705>
- Darzal. (2016). Analisis disparitas pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 131–142. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i2.3588>
- Detollenaere, J., Desmarest, A. S., Boeckxstaens, P., & Willems, S. (2018). The link between income inequality and health in Europe, adding strength dimensions of primary care to the equation. *Social Science & Medicine*, 201, 103–110. <https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2018.01.041>
- Fahmi, M., & Mulyono, Y. O. (2015). Pendidikan, human capital atukah signaling? Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 113–120.
- Hamzah, F., Rosyadi, & Kartika, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, gender gap dan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 77. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22985>
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY tahun 2011–2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/7227>
- Hutter, C., & Weber, E. (2023). Labour market effects of wage inequality and skill-biased technical change. *Applied Economics*, 55(27), 3063–3084. <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2108751>
- Iskandar, A. M. (2021). *Negara dan politik kesejahteraan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2018). Analisis pengaruh tingkat

- pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008–2018. *Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125.
- Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022). Kesehatan dan makna sehat. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat)
- Khoirudin, L., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1).
- Kusumo, H. J. (2023). Lulusan sarjana dominasi pengangguran di DIY. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/herlambang-jati-kusumo/sarjana-dominasi-angka-pengangguran-di-diy>
- Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020). Pengaruh PMA, PMDN, TPAK, PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah terhadap disparitas pendapatan Jawa. *Stability: Journal of Management and Business*, 3(2), 21–34. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/stability/article/view/7781>
- Lead, A. (2017). Reducing income inequality to advance health. *American Public Health Association (APHA)*. <https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-database/2018/01/18/reducing-income-inequality-to-advance-health>
- Mankiw, G. N. (2003). *Teori makro ekonomi* (Terjemahan). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muharam, K. I. (2022). Analisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015–2020. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 284–294. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess>
- Nadya, A. (2019). Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52. <https://doi.org/10.25105/ME.V27I1.5300>
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022a). Pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2). <https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/191/83>
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022b). Pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia perkembangan rasio Gini Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2).
- Nuraini, E. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 5(1), 52–67.